

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era otonomi Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara lebih terbuka dan dapat di pertanggungjawabkan dan diarahkan pada efisiensi. Suatu daerah dapat maju dan berkembang, jika dapat menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabilitas yang tinggi. Hal utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah otonomi sanggup berdiri sendiri dalam pembangunannya terletak pada kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri serta dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat menjadi seminimal mungkin Andani (2022).

Provinsi Papua adalah provinsi yang ada di Indonesia dengan ibukota yang berada di Jayapura. Papua terletak di pulau New Guinea bagian barat atau west New Guinea. Papua merupakan provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Provinsi Papua sebagai daerah otonomi yaitu melalui penetapan anggaran belanja daerah yang alokasinya sudah disesuaikan melalui kebijakan strategis yang diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan publik, mendorong adanya akselerasi pembangunan, dan sebagai instrumen pemberdayaan seluruh masyarakat Papua, terutama penduduk orang asli Papua.

Pemerintah pusat juga menegaskan bahwa untuk dimekarkan di wilayah Papua merupakan salah satu wujud untuk menciptakan pemerataan pembangunan

Selain itu, dengan adanya daerah otonomi baru, diharapkan akan mempermudah jangkauan layanan di tanah Papua. Pada Tahun 2022, pulau Papua mengalami pemekaran daerah, Sebelumnya hanya ada 2 (dua) provinsi dimana menghasilkan 5 (lima) provinsi baru Tabuni et al., (2023).

Dalam pengelolaan keuangan daerah memerlukan pengelolaan kinerja atau pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja mempunyai sifat yang moneter atau non moneter dari hasil yang diperoleh, kemudian hasil yang diperoleh dari aktivitas atau pekerjaan. Di lain sisi pemerintah daerah di provinsi Papua masih menghadapi berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah. situasi ini berdampak pada keterbatasan dalam meningkatkan alokasi belanja modal. Hal ini sangat penting untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Di bawah ini merupakan Tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Tabel 1. 1

PAD dan Belanja Modal Provinsi Papua tahun 2019-2023

No	Tahun	PAD	Belanja Modal
1	2019	2.755,27	12.185,97
2	2020	2.972,56	9.650,11
3	2021	3.627,40	7.804,89
4	2022	4.123,48	9.930,50
5	2023	1.116,03	2.522,53

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/> (data di olah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat mengenai dinamika pendapatan Asli daerah dan Belanja modal provinsi Papua selama periode tahun 2019-2023 mencerminkan pengelolaan keuangan daerah di tingkat provinsi, PAD Provinsi

papua menunjukkan tren yang fluktuatif, namun secara umum mengalami peningkatan signifikan dari Rp. 2.755,27 miliar di tahun 2019 menjadi Rp. 4.123,48 miliar di tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan drastis menjadi Rp. 1.116,03 miliar.

Pola Belanja Modal Provinsi Papua menunjukkan tren yang berbeda dengan PAD. setelah mencapai puncaknya di tahun 2019 dengan angka Rp. 12.185,97 miliar, Belanja Modal mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi Rp. 7.804,89 miliar. Dan sempat naik di tahun 2022 menjadi Rp. 9.930,50 miliar, kemudian belanja modal turun drastis menjadi Rp. 2.522,53 miliar. Ini mencerminkan adanya perubahan prioritas anggaran, efisiensi belanja daerah, atau dampak dari pemekaran wilayah.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum Andani, (2022). Sedangkan menurut Oktavianti, (2020) Belanja modal adalah arus pengeluaran yang terjadi dalam memperoleh aset jangka panjang, dimana manfaat yang dapat digunakan atau dinikmati dalam kurun waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal mencakup pengeluaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk membiayai aset jangka panjang, misalnya gedung pembelian tanah, atau penyediaan sarana infrastruktur. Pengeluaran ini tidak hanya dipakai pada periode berjalan, tetapi memberi manfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu yang

lama.besarnya belanja modal sering digunakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publikDesipradani,(2024).

Faktor- faktor yang mempengaruhi belanja modal dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi khusus (DAK), Dana alokasi umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah,retribusi daerah,hasil perusahaan milik daerah,hasil pengelolaan hasil daerah yang dipisahkan,dan lain-lainnya pendapatan asli daerah yang sah Zais, (2018).

Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam belanja modal tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan, karena aset yang dibangun memerlukan pemeliharaan dan operasional yang terus-menerus.Selain itu, anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah sehingga belanja modal perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Belanja modal dipengaruhi oleh melalui beberapa rasio, seperti rasio desentralisasi,rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Menurut Geatri et al., (2023).

Rasio derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi Mustika,(2020). Menurut Abdullah & Zakiyah, (2022) menyatakan bahwa tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Hasil penelitian yang dilakukan Andari, (2023) menunjukan bahwa

rasio derajat desentralisasi dan rasio kemandirian kurang baik dalam mengelola kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Junaidi,(2019) menunjukkan bahwa hanya derajat desentralisasi fiskal, efektivitas PAD dan efisiensi keuangan yang berpengaruh langsung terhadap alokasi belanja modal.

Rasio kemandirian menggambarkan sejauh mana suatu daerah dapat mengelola kegiatan pemerintah dan pembangunan dengan mengandalkan pendapatan asli daerahnya. Semakin besar proporsi PAD dibandingkan dana transfer dari pusat, semakin mandiri daerah dalam membiayai kebutuhan publiknya Mustika,(2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indiyanti & Rahyuda, (2018). menunjukkan rasio kemandirian daerah mempengaruhi alokasi belanja modal. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Muzaki, (2022) bahwa Rasio kemandirian tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal pada Pemda Tulungagung periode 2015-2021.

Rasio efektivitas PAD sebagai indikator dalam menilai kinerja keuangan merupakan aspek yang bisa mempengaruhi alokasi belanja modal Menurut Indiyanti & Rahyuda, (2018) Selain itu, rasio efektivitas PAD mengukur sejauh mana daerah berhasil memungut pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muzaki,(2022) Rasio efektivitas tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal pada Pemda Tulungagung periode 2015-2021. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mudamakin,(2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang mulai dari tahun 2017 – 2018 masuk dalam kategori Sangat Efektif.

Rasio efisiensi keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan pendapatannya untuk belanja daerah menurut Auliya & Hidajat, (2024). Rasio efisiensi di ukur dengan cara membandingkan total penerimaan dan pengeluaran daerah.apabila total penerimaan lebih besar dari pada total pengaeeluaran maka daerah tersebut dapat dikatakan efisien. Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Muzaki, (2022) menyatakan bahwa hasil Rasio efektivitas tidak memiliki pengaruh bagi belanja modal pada Pemda Tulungagung periode 2015-2021. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tumija & Sinta,(2022) Tingkat efektivitas dan efisiensi PAD, Kabupaten Cilacap sudah sangat efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang diatas teori yang digunakan yaitu teori keagenan (agency) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat. Hubungan keagenan antara pemerintah dan masyarakat serta antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan adanya delegasi kewenangan dan tanggung jawab. Pemerintah pusat sebagai prinsipal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai agen, yang berkewajiban mengoptimalkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sambil tetap memperhatikan haknya untuk mencapai kesejahteraan.

Fenomena penelitian ini adalah adanya perbedaan atau ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam alokasi anggaran terhadap belanja modal, yang dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dari beberapa penelitian sebelumnya, terdapat beberapa hasil yang berbeda dan cenderung tidak konsisten satu sama lain yang menimbulkan research gap dari sisi penelitian. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh empat rasio keuangan desentralisasi, kemandirian, efektivitas dan efisiensi terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota provinsi Papua diharapkan dapat memberikan wawasan berharga kepada pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah tentang bagaimana meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan mengoptimalkan alokasi belanja modal. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat memaksimalkan potensi ekonomi daerah, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Papua, serta mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan merata dan dapat memajukan Provinsi Papua.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2019-2023, sehingga dapat membedakan hasil dengan penelitian terdahulu berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Papua”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Rasio Desentralisasi berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Papua?
2. Apakah Rasio Kemandirian berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Papua?
3. Apakah Rasio Efektifitas berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Papua?
4. Apakah rasio Efisiensi berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten/Kota provinsi Papua ?
5. Apakah Rasio Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Desentralisasi terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Papua
2. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Papua
3. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Efektifitas terhadap Belanja Modal di kabupaten/kota Provinsi Papua

4. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota provinsi Papua
5. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Papua

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi peneliti serta membaca mengenai teori tentang bagaimana pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal pada Provinsi Papua.
2. Penelitian ini diharapkan juga akan memperkaya literatur ilmiah dan memperdalam teori bagi peneliti dan pembaca, tetapi juga bermanfaat sebagai saran serta masukan yang berguna untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya terhadap penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan bagi pemerintah Provinsi Papua. Diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan anggaran pendapatan dan

belanja daerah (APBD) sehingga tercapainya peningkatan pembangunan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

